

PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN PASAR
CIBADAK SUKABUMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR : 5 TAHUN 1999 (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 658 K/PDT.SUS-KPPU/2013)

MAURITS BODEWIJN NUNUMETE

ABSTRAK

Konspirasi usaha atau persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dan atau pihak lain dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Anti Monopoli. Undang-Undang Anti Monopoli melarang kegiatan persekongkolan yang salah satu bentuknya adalah persekongkolan untuk mengatur pemenang tender. Meskipun Undang-Undang Anti Monopoli melarang kegiatan tersebut, namun hal tersebut masih saja terjadi. Salah satunya terjadi pada tender Pembangunan Pasar Cibadak Kabupaten Sukabumi tahun 2011. Perkara ini telah diputus dan ditetapkan oleh KPPU dalam putusan nomor 07/KPPU-L/2012 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung dalam putusan 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013, Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan mengetahui, menggambarkan, dan menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 mengenai Persekongkolan Tender Pembangunan Pasar Cibadak Sukabumi merupakan pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli dan sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelanggaran tersebut dan upaya hukum sampai kasasi dari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif, dan bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta teknik analisa yang dipergunakan adalah analisa diskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan, Komisi mendapatkan bukti bahwa benar telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU Anti Monopoli dan memenuhi semua unsur persekongkolan dalam Pasal 22 UU Anti Monopoli. Komisi menetapkan 3 (tiga) Terlapor dalam perkara No. 07/KPPU-L/2012 serta memberikan sanksi administratif dan denda. Jenis persekongkolan yang terjadi secara gabungan yaitu persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal. Penjatuhan sanksi hukum pada putusan KPPU 07/KPPU-L/2012 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung dalam putusan 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 adalah menyatakan para terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Anti Monopoli. Para terlapor dilarang mengikuti tender pelelangan yang menggunakan sistem Bangun Guna Serah di seluruh Indonesia, serta menghukum terlapor dengan membayar denda yang harus disetorkan ke kas negara.

Kata kunci: Persekongkolan, Sanksi

BID RINGING SUKABUMI CIBADAK MARKET
DEVELOPMENT IN TERM OF LAW NUMBER 5 OF 1999
(THE CASE STUDY SUBPRIME COURT RULING
NUMBER 658 K/PDT.SUS-KPPU/2013)

MAURITS BODEWIJN NUNUMETE

ABSTRACT

Conspiracy attempt or conspiracy is a form of cooperation undertaken by businesses to other businesses or other party with the intention of controlling the relevant market for the benefit of business operators who scheme which is one form of activity that is prohibited under antitrust law undand. Antitrust law prohibits activities that shape one of the conspiracy is a conspiracy to set up the winner of the tender. Despite the antitrust lawas prohibit such activity but it stil bappenas. One of them occurred in the tender construction market Cibadak Sukabumi district year 2011. The master has bene disconnected and set by “KPPU” in the berdiet the number 07/KPPU-L/2012 has acquire the force of law by the Subprime Court in your fixed verdict 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 on market development of the tender conspiracy Cibadak Sukabumi is a violation of antitrust lawas and the legal sannctions impoten against such breach and the remedy until the cassation of teh verdict. Research method user in this study are normative, legal research and legal materials and legal materials and legal materials tertiary secondary, as will as analysis technique used is descriptive qualitative analysis.The results of this study shower that based on the results of teh preliminary examination and a follow-up, the Commission get proof that the right has occurred a breach of article 22 of the antitrust laws and meet all the elements of a conspiracy in article 22 of the antitrust laws. The Commision sets out three reporter in number 07/KPPU-L/2012 as will as provide administrative penalties and fines. The kind of collaboration that occurs in the joint that is vertical and horizontal conspiracy. The overthrow of legal sanctions on teh ruling of the “KPPU” number 07/KPPU-L/2012 which has acquired permanent legal force by the Subprime Court in a ruling stating the reporter 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 is legally and convincingly violate article 22 of the antitrust lawas. The reported prohibited following the tender autions that ude the system to waka up to teh transfers across Indonesia, as well as punish reported by paying fines must be deposited into the state treasury.

Keyword : Conspiracy, Sanctions